



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARIS SETIAWAN
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 97059

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.630.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 340 m ² /306 m ² di KAB / KOTA TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 143 m ² /143 m ² di KAB / KOTA TEGAL, HIBAH TANPA AKTA Rp. 150.000.000		
3. Tanah Seluas 1.022 m ² di KAB / KOTA TEGAL, HIBAH TANPA AKTA Rp. 300.000.000		
4. Tanah Seluas 1.510 m ² di KAB / KOTA TEGAL, HIBAH TANPA AKTA Rp. 300.000.000		
5. Tanah Seluas 995 m ² di KAB / KOTA TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	282.500.000
1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000		
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000		
3. MOBIL, HONDA HONDA BR V Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 255.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	70.100.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	1.982.600.000

**III. HUTANG**

Rp.

500.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.482.600.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.